

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Ahmadi Miru dan Andi Surya Nusantara Djabba. 2022. *Hukum Perusahaan, Bentuk-Bentuk Perusahaan*. Kencana. Jakarta.
- Aminuddin Ilmar. 2012. *Hak Menguasai Negara Dalam Privatisasi BUMN*. Kencana. Jakarta.
- Dedi Kusmayadi, Dedi Rudiana, dan Jajang Badruzaman. 2015. *Good Corporate Governance*. Universitas Siliwangi. Tasik Malaya.
- Djoko Imbawani Atmadjaja. 2016. *Hukum Perdata*. Setara Press. Malang.
- Edwar Manik. 2012. *Cara Mudah Memahami Proses Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Mandar Maju. Bandung.
- Erman Rajagukguk. 2016. *BUMN dalam Bentuk Perseroan Terbatas*. Universitas Indonesia Fakultas Hukum. Jakarta.
- Hadi Shubhan. 2014. *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, Dan Praktik Di Peradilan*. Kencana. Jakarta.
- Imran Nating. 2019. *Peranan dan Tanggung Jawab Kurator dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*. Rajagrafindo Persada. Jakarta.
- Irwansyah. 2021. *Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*. Mitra Buana Media. Yogyakarta.
- Jimly Asshiddiqie. 2018. *Gagasan Konstitusi Sosial Negara Kesejahteraan Sosial Indonesia*. Kompas Media Nusantara. Jakarta.
- Jono. 2008. *Hukum Kepailitan*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Mochtar Kusumaatmaja dan B Arief Sidharta. 2021. *Pengantar Ilmu Hukum*. Alumni. Bandung.
- Peter Mahmud Marzuki. 2017. *Metode Penelitian Hukum*. Kencana. Jakarta.
- Putu Samawati. 2018. *Monopoli BUMN dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha*. Tunggal Mandiri. Malang.
- Refli Harun. 2020. *Hukum BUMN (Badan Usaha Milik Negara)*. Balai Pustaka. Jakarta.
- Slamet Titi S. 2015. *Hakikat Hukum Kepailitan*. Global Publishing.
- Susanti Adi Nugroho. 2018. *Hukum Kepailitan Di Indonesia Dalam Teori Dan Praktik Serta Penerapan Hukumnya*. Kencana. Jakarta.

- Sutan Remy Sjahdeini. 2016. *Sejarah, Asas, Dan Teori Hukum Kepailitan*. Prenadamedia Group. Jakarta.
- Yuhelson. 2019. *Hukum Kepailitan Indonesia*. Ideas Publishing. Gorontalo.
- Zaeni Asyhadi. 2018. *Hukum Keperdataan*. RajaGrafindo Persada. Depok.

Jurnal:

- Andhika Lesmana Rian. 2017. "Public Goods Bukankah Untuk Rakyat?" *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*. Vol. 8. No. 1.
- Dona Pramata Jonaidi. 2019. Telaah Terhadap Kebijakan Privasi BUMN di Indonesia. *Ubelaj*. Vol. 4. No. 1.
- Kuntana Magnar, Inna Junaenah dan Giri Ahmad Taufik. 2016. Tafsir MK Atas Pasal 33 UUD 1945. *Jurnal Konstitusi*. Vol. VII. No. 1.
- Marsudi Dedi Putra. 2021. Negara Kesejahteraan (Welfare state) dalam Perspektif Pancasila. *Likhitaprajna Jurnal Ilmiah*. Vol. 23. No. 2.
- Moraya. Hatuju. Flora Pricilla Kalalo. dan Roosje Lasut. 2020 "Tinjauan Yuridis Peranan Menteri Keuangan Dalam Pengajuan Permohonan Pernyataan Pailit Terhadap Debitor BumN." *Lex Et Societatis*. Vol. VIII. Nomor 4.
- Niru Anita Sinaga. 2016. Hkum Kepailitan dan Permasalahannya di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*. Vol. 7. No. 1.
- Shidara. 2009. Akar Permasalahan Kontroversi Seputar Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. *Jurnal Legislasi Indonesia*. Vol. 6, No.2.
- Syarifuddin Makmur. 2016. Kepastian Hukum Kepailitan Bagi Kreditor dan Debitor Pada Pengadilan Niaga Indonesia. *Jurnal Ilmu Syariah FAI Universitas Ibnu Kaldun*. Vol. 4. No. 2.

Internet

- Hendry Sepriawan. 2014. Kewenangan Menteri Keuangan Dalam Mempailitkan BUMN. <http://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/73984> diakses pada 8 mei 2023.

Shidarta, 2016, Peran Negara dalam Menghadapi Investasi Menurut Teori Kepentingan Pound. <https://business-law.binus.ac.id/2016/01/03/peran-negara-dalam-menyikapi-investasi-teori-kepentingan-pound/>. diakses Pada 21 mei 2023.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1998 tentang Perusahaan Umum.